

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan sektor yang dikelola oleh perorangan dalam masyarakat. Perkembangan UMKM didukung oleh adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Potensi besar yang dimiliki UMKM dalam membangun perekonomian merupakan suatu alat pemerintah dalam menggerakkan bidang perekonomian. Kontribusi UMKM yang besar terhadap PDB nasional mempunyai potensi yang tinggi dalam membangun lapangan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami peningkatan. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, UMKM di Indonesia mengalami perkembangan 8% setiap tahun. Sebanyak 59,2 juta jumlah UMKM menyokong 90% pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan peranan terhadap kemajuan perekonomian, hal ini juga diikuti dengan tantangan yang dihadapi UMKM salah satunya penggunaan informasi akuntansi yang jarang diterapkan pada usahanya sedangkan informasi akuntansi merupakan bagian terpenting dari seluruh informasi yang disajikan khususnya keuangan (Nurwani dan Ayu, 2019). Pelaksanaan pembukuan keuangan merupakan hal yang sulit bagi UMKM dikarenakan keterbatasan pengetahuan akuntansi, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan, tidak ada

dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* untuk memudahkan pembukuan. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan informasi akuntansi merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berindikasi bahwa suatu usaha melaporkan keuangan berdasarkan kebutuhannya dan cenderung tidak melaporkan secara kontinyu (Yulia dan Endra, 2017). Keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi non-akuntansi dan pengamatan sepiantas atas situasi pasar (Rizki dan Sylvia, 2012).

Informasi akuntansi bermanfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dalam mengambil keputusan serta memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan UMKM. Pertumbuhan UMKM yang meningkat diikuti adanya perkembangan berbagai sektor UMKM, salah satunya lembaga keuangan sejenis *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang menyediakan pembiayaan bagi UMKM (M. Mahbubi dan Ascarya, 2010). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sampai akhir 2018 unit koperasi mencapai 152.178 sektor koperasi, dimana 23.551 unit merupakan koperasi simpan pinjam, 127.627 unit non-koperasi simpan pinjam dan kurang lebih 1.000 unit diantaranya (*Baitul Maal wa Tamwil*) BMT atau dikenal Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Pembentukan BMT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 sebagai sebuah lembaga keuangan mikro dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) disahkan oleh Departemen Kementrian Koperasi

dan UMKM (Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya fokus kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) (Zulkifli dkk, 2016). Adanya BMT dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, salah satunya ketersediaan modal yang cukup. Alasan yang melatarbelakangi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yaitu agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak, melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara insentif, agar masyarakat golongan ke bawah terhindar dari rentenir yang menariskan imbalan bunga pinjaman yang tinggi dan alokasi dana yang merata pada masyarakat.

Pertumbuhan BMT di Indonesia mencapai 1.000 BMT yang memberikan pelayanan terhadap 3,7 juta orang dengan aset sebesar Rp 16 Triliun yang dikelola sekitar 200.000 orang (Nina, 2018). Pesatnya perkembangan BMT tidak berarti bahwa lembaga terbebas dari beberapa masalah yang menjadi resiko. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) kurang memperhatikan masalah efisiensi operasional yang menyebabkan rendahnya pendapatan BMT (Adi dan Sri, 2015). Pendapatan menjadi tolak ukur seberapa baik seseorang mengelola suatu usaha. Sehingga pendapatan yang dihasilkan akan memotivasi seseorang untuk bekerja.

Namun, realitanya beberapa BMT terpaksa harus gulung tikar, tidak beroperasi bahkan harus berhadapan dengan persoalan hukum karena *mis-management* (Adi dan

Sri, 2015). Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya pendanaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknologi informasi dan rendahnya penggunaan informasi akuntansi (Gampito 2008 dalam Zulkifili dkk, 2016). Dari faktor-faktor tersebut, faktor penggunaan informasi akuntansi kurang diperhatikan oleh BMT. Diketahui bahwa informasi akuntansi merupakan alat yang dapat membantu manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya dengan baik dan berkesinambungan.

Pengelolaan dana yang dilakukan BMT bertugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya, diantaranya berbentuk informasi akuntansi. Informasi akuntansi merupakan salah satu indikator akuntabilitas BMT namun realitanya penggunaan informasi akuntansi kurang akuntabel dan belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Putriningtyas dan Usnan, 2019). Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kualitas koperasi. Berikut merupakan hasil penilaian kesehatan KSPPS dan KJKS wilayah Semarang:

**Tabel 1.1 Penilaian Kesehatan KSPPS dan KJKS wilayah Semarang**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Koperasi Sehat	20 Unit	31,25%
Koperasi Cukup Sehat	44 Unit	68,75%

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM wilayah Semarang 2017, data diolah*

Berdasarkan data diatas, kategori koperasi sehat hanya 31,25% sisanya cukup sehat. Hal ini menunjukkan belum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kategori koperasi sehat. Pengukuran terhadap penilaian kategory sehat atau tidaknya koperasi berdasarkan atas beberapa aspek rasio, yaitu aspek permodalan, kualitas aktivia produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi (06/PER/DEP.6/IV/2016). Penilaian tingkat kesehatan koperasi dihitung berdasarkan informasi akuntansinya. Koperasi yang memiliki informasi akuntansi yang baik maka dapat mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kesejahteraan anggota yaitu koperasi yang mempunyai kemampuan finansial, manajemen, memberikan peningkatan konsumsi anggotanya dan mampu memberikan fasilitas permodalan untuk mendorong anggotanya membuka usaha yang baru (I Wayan dan IGW, 2013). Penggunaan informasi akuntansi pada suatu usaha mempunyai kontribusi penting dalam pengambilan keputusan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM termasuk koperasi (Sungkono, 2010).

Sebagai badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, koperasi harus mengelola usahanya secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima, dan dipercaya oleh anggotanya maupun masyarakat (Amrul dan Musfiari, 2017). Sehingga dalam praktiknya, koperasi harus menerapkan informasi akuntansi secara baik dan benar. Informasi akuntansi merupakan alat yang efektif bagi manajemen untuk mengarahkan

dan menjalankan usahanya. Fakta yang terjadi tidak sedikit manajemen yang belum menguasai, menyusun atau menggunakan informasi akuntansi sebagai pijakan dalam manajemen usahanya (Dwi, 2017).

Kualitas informasi akuntansi perlu diperhatikan, sehingga perlu adanya sebuah sistem memadai guna memudahkan pelaku usaha dalam mengolah informasi akuntansi. Kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan dapat membahayakan operasional perusahaannya. Kondisi keuangan memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga dapat menyebabkan kegagalan perusahaan. Belkaoui (2011) dalam Evi dan Mitha (2015) menyatakan informasi akuntansi merupakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang berguna untuk menentukan opsi tindakan. Informasi akuntansi memiliki peranan yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dan pedoman bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan atau pengaturan strategi guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Penggunaan informasi akuntansi berguna bagi pelaku usaha untuk mengkomunikasikan kemampuan usaha kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Informasi akuntansi sangat berguna untuk mengikhtisarkan profitabilitas atau laba atas usaha yang dijalankan (Ni Made Rai dan Made Gede, 2017).

Romney dan Steinbart (2004) dalam Dwi (2017) berpendapat informasi akuntansi bermanfaat bagi usaha ketika memiliki karakteristik, seperti relevan, andal, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Penggunaan informasi akuntansi

dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan pemilik, skala usaha dan umur usaha (Ariska dkk, 2017). Sedangkan menurut Enung dan Lia (2015) pengetahuan akuntansi dan skala usaha menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Dari beberapa faktor tersebut, tingkat pendidikan pemilik menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh utama bagi pelaku usaha dalam penggunaan informasi akuntansi. Skala usaha juga menjadi salah satu faktor penentu seberapa besar terhadap usaha. Selain itu, pengetahuan akuntansi merupakan faktor utama yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha atas pengambilan keputusan pada informasi akuntansi.

Tingkat pendidikan pelaku usaha sebagai dasar perubahan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada usaha yang dijalankan berdasarkan pendidikan yang ditempuh. Tingkat pendidikan adalah tahapan awal yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai dan kemampuan yang dikembangkan (UU No. 20, 2003). Samuj (2007) dalam Listiorini dan Desi (2018) menyatakan tingkat pendidikan formal pelaku usaha atau manajer keuangan mempengaruhi dalam penggunaan informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku usaha maka semakin tinggi rasionalisasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan informasi akuntansi yang dihasilkan (Ariska dkk, 2017).

Skala usaha menunjukkan kemampuan usaha dalam mengelola usaha dengan memperhatikan jumlah karyawan dan besar pendapatan yang diperoleh usaha tersebut. Skala usaha berpengaruh dalam penggunaan informasi akuntansi. Sitoresmi (2013)

dalam Ariska, dkk (2017) berpendapat bahwa seiring berkembangnya usaha, skala usaha memiliki pengaruh tingkat kompleksitas usaha meningkat dan informasi akuntansi sangat dibutuhkan. Semakin besarnya skala usaha, maka suatu usaha akan memperkerjakan karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, Semakin besar skala usaha maka kebutuhan informasi akuntansi semakin penting dalam suatu perusahaan.

Pengetahuan akuntansi merupakan suatu persepsi yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau informasi mengenai pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi dalam bentuk yang transparan dan rasional dengan tujuan memaparkan informasi akuntansi guna pengambilan keputusan. Pelaku usaha atau manajer yang memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi maka dapat menafsirkan informasi akuntansi sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan usaha. Pengetahuan akuntansi pelaku usaha dapat menentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam melaksanakan operasional usahanya yang mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kedewasaan usaha dalam mengambil sikap atas tindakan atau keputusannya yang melihatan pemahaman atau penerapan dibidang akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menguji faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu, penelitian dari Listiorini dan Desi (2018) menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi pada UMKM.

Sedangkan penelitian Ariska, Zarah dan Aryo (2017) menyatakan tingkat pendidikan pelaku usaha berpengaruh terhadap pemanfaatan informasi akuntansi. Untuk variabel skala usaha penelitian terdahulu Enung dan Lia (2015) menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM sedangkan Yulia dan Endra (2017) menyatakan skala usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Kemudian variabel pengetahuan akuntansi menurut Dwi (2017) menyatakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi akuntansi sedangkan menurut Dewi, Fatahurazzak dan Sari (2016) bahwa pengaruh akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan antara beberapa penelitian terdahulu, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI TINGKAT PENDIDIKAN, SKALA USAHA, DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) WILAYAH SEMARANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi seperti persepsi tingkat pendidikan, skala usaha dan pengetahuan akuntansi. Peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana

manajer perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi. Berdasarkan penelitian terdahulu maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah persepsi tingkat pendidikan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada (*Baitul Mal Wa Tamwil*) BMT wilayah Semarang ?
2. Apakah skala usaha mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada (*Baitul Mal Wa Tamwil*) BMT wilayah Semarang ?
3. Apakah pengetahuan akuntansi mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada (*Baitul Mal Wa Tamwil*) BMT wilayah Semarang ?
4. Apakah tingkat pendidikan, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi secara simultan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada (*Baitul Mal Wa Tamwil*) BMT wilayah Semarang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi tingkat pendidikan, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi mempengaruhi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada (*Baitul Mal Wa Tamwil*) BMT wilayah Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM khususnya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dalam meningkatkan persepsi dan pengetahuan akuntansi dalam

menggunakan informasi akuntansi sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

- b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di masyarakat dan membeikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dalam penilaian berikutnya, khususnya tentang permasalahan penggunaan informasi akuntansi pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

b. Bagi Penulis

Sebagai pengaplikasian ilmu akuntansi yang telah dipelajari dan menambah wawasan mengenai penggunaan informasi akuntansi pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II            KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian digunakan dalam penelitian, berisikan jenis data, sumber data, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV           ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penentuan sampel penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu dengan berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai.